10

SUMBANG PENDAPAT DARI FAKULTAS KEHUTANAN IPB

Dr. Ir. Dudung Darusman, MA
(Dekan Fakultas Kehutanan IPB)

Disampaikan pada Rapat Kerja Departemen Kehutanan di Jakarta, 4 Mei 1990

Dengan kehormatan sebagai narasumber pada Rapat Kerja Departemen Kehutanan 1990, sementara itu kesempatan hadir terbatas pada sidang pleno, maka perkenankan kami menyampaikan beberapa pendapat tertulis sebagai berikut.

1. Masalah Desentralisasi

1.1. Bagi perubahan struktur ekonomi Kehutanan Indonesia (dan wilayah-wilayah) masih diperlukan peran Pemerintah Pusat atau sentralisasi, sampai tercapai struktur yang optimum.

1.2. Desentralisasi perlu dilakukan secara bertahap, yakni dimulai pada *scope* perencanaan operasional dari program-program kehutanan, kemudian bertahap sampai pelaksanaan/pengelolaan penuh.

1.3. Desetralisasi di mulai dari aturan main yang bersifat teknis/operasional kemudian secara bertahap kepada kebijaksanaannya. Misalnya dalam penentuan DR, IHH, dll; maka perumusnya boleh (masih harus) sama, tetapi angka-angka yang dimasukan tergantung kondisi-kondisi setempat (kemajuan ekonomi, skala/ukuran dan kualita log, dll.).

2. Masalah Penentuan Besarnya Pungutan-Pungutan

2.1. Pungutan-pungutan itu (yang merupakan sumber *income* bagi Pemerintah) adalah juga *instrument* ekonomi bagi dunia usaha kehutanan. *Instrument* mana sangat efektif dan efisien dalam pengendalian pengelolaan hutan, secara maksimal dan lestari. Di samping pungutan yang bersifat *disinsentif* terdapat *instrument* subsidi/fasilitas yang bersifat *insentif*.

2.2. Kondisi-kondisi ekonomi kehutanan di tiap propinsi sangat berbeda-beda, yang dicerminkan dengan besarnya (dan struktur) *cost* dan *price* yang berbeda-beda, sehingga besarnya insentif dan disinsentif tersebut harus berbeda-beda pula. Disinilah letak perlunya desentralisasi (mungkin pengelolaan/pelaksanaanya masih tetap sentralisasi).

2.3. Apalagi ada kebijaksanaan pengembangan Indonesia Bagian Timur (IBT) maka desentralisasi dalam aturan-aturan main tersebut perlu diperhatikan.

3. Masalah Limbah Kayu yang Tidak Dimanfaatkan

3.1. Secara ekonomi limbah kayu akan selalu ada (walaupun secara teknologi limbah tersebut dapat diolah) karena adanya kayu-kayu marjinal, yakni harga jualnya sama dengan (atau lebih rendah) dari biaya produksinya.

3.2. Penerapan teklologi yang menurunkan biaya produksi dan kemajuan ekonomi (pemasaran) yang meningkatkan harga, akan dengan sendirinya mengurangi limbah kayu.

3.3. Limbah kayu seringkali terjadi karena masalah peraturan yang berlaku (kelembagaan), misalnya :

a. Aturan batas diameter pada TPTI, apakah untuk pohon atau sortimen ?
b. Pungutan yang dinamis, yakni dipengaruhi oleh nilai kayu, artinya pungutan untuk limbah hendaknya lebih kecil.
c. *Accounting* perusahaan yang *fleksible*, misalnya *"fixed cost"* tak perlu dibebankan kepada limbah kayu, walaupun diambil.

4. Masalah Kriteria Volume < 20 m³/ha Bagi Calon Areal HTI

4.1. Kriteria volume sangat tergantung pada tahapan pertumbuhan tegakan. Misalnya, 20 m^3 anakan dapat berupa ratusan pohon per hektar, 20 m^3 tiang dapat puluhan pohon, sedangkan 20 m^3 masak tebang hanya beberapa pohon saja.

4.2. Kriteria pertumbuhan (*growth*) lebih baik dari kriteria volume, namun harus dilihat pada tahapan mana yang kita ukur, misalnya pertumbuhan tahapan anakan dan masak tebang lebih rendah daripada tahap tiang.

4.3. Kriteria 20 m^3 tersebut perlu untuk semua jenis, baik komersial maupun non-komersial, karena beberapa tahun terakhir kayu non-komersial menjadi komersial.

4.4. Kriteria 20 m^3 tersebut perlu ditinjau menurut wilayah pertumbuhan tegakan hutan. Misalnya untuk Pulau Timor volume 20 m^3 mungkin sudah merupakan volume hutan normal. Sekali lagi dalam hal aturan main seperti ini desentralisasi diperlukan.

5. Masalah Program bidang PHPA, yakni perlu didorong investasi dalam "industri" wisata, penangkaran dan sebagainya

5.1. Rentabilitas usahanya lebih tinggi daripada HTI, ROI-nya tinggi, karena di samping nilainya tinggi juga tingkat investasi di bidang ini masih rendah sehingga *Marginal Efficiency of Investment (MEI)*- nya masih tinggi.

5.2. Prosedur investasi perlu dipermudah, tapi tidak perlu diberi subsidi, yang diperlukan adalah promosi dari Ditjen PHPA kepada para investor melalui BKPM dan Bappenas.

5.3. *"Multiplier Effect"* ekonomi regionalnya (lapangan kerja dan *income*) lebih besar daripada industri kehutanan yang lain.

5.4. Industri di bidang PHPA tidak mengganggu ekosistem hutan, karena tidak mengganggu/mengambil pohon yang merupakan unsur terpenting penyangga ekosistem hutan.

6. *Masalah Penelitian, Pengembangan dan Pendidikan*

6.1. Fakultas-Fakultas Kehutanan di seluruh Indonesia supaya dijadikan bagian integral dari sistem Litbang Kehutanan. Tidak hanya diambil satu per satu tenaga kami, tapi lembaga Fakultas diberi porsi yang jelas dan terpola dari Litbang tersebut.

6.2. Demikian pula dalam bidang pendidikan dan latihan kehutanan; perlu dimasukkan peran serta Fakultas terutama yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni program pendidikan Diploma Kehutanan (D1,D2, dan D3). Fakultas-Fakultas Kehutanan (yang masing-masing mempunyai kelebihan dalam pendidikan kehutanan) dapat bersama-sama mengelola program diploma tersebut dengan anggaran biaya dari Departemen Kehutanan RI.